



Pengaruh Implementasi Kepmen No. 57 Tahun 2014 Terhadap Produksi Ikan Tuna yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Samsul Bahri Usia ^{1✉}, John W. Ch. Karuwal ² dan Umar Tangke ²

¹ Mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Pertanian dan Perikanan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Ternate. Indonesia.

² Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Pertanian dan Perikanan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Ternate. Indonesia.

Email : samsulbusia98@gmail.com

✉ Korespondensi : Samsul Bahri Usia, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Ternate. Indonesia,
Email : samsulbusia 98@gmail.com

Info Artikel :	<input checked="" type="checkbox"/> Artikel Penelitian	<input type="checkbox"/> Artikel Pengabdian	<input type="checkbox"/> Riview Artikel
*Diterima : 12 Sept. 2023 *Disetujui : 27 Jan. 2024 *Publikasi On-Line : 27 Jan 2024			

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Implementasi Peraturan KepMen No 57 Tahun 2014 terhadap aktivitas bongkar muat ikan Tuna di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate sebelum dan setelah dijalankan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak penerapan Implementasi Peraturan KepMen No 57 Tahun 2014 bagi kegiatan bongkar muat Ikan tuna di PPN Ternate. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Propinsi Maluku Utara memegang peranan penting sebagai basis perikanan dalam menunjang perkembangan usaha perikanan terutama penangkapan ikan yang semakin berkembang. Transshipment di bidang perikanan adalah kegiatan pindah muatan hasil tangkapan di tengah laut dan sekarang dilarang bagi kapal penangkap ikan yang ada di Indonesia. Metode pengambilan data ini dilakukan dengan menghubungi kantor PPN Ternate sebagai penyedia data. Untuk mendapatkan gambaran pengambilan data dilakukan juga wawancara langsung dengan staf pendataan pada PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate layak untuk dikembangkan baik dari aspek fasilitas pokok, maupun berdasarkan letak lokasi pelabuhan. Pelabuhan Perikanan Nusantara. Produksi ikan tuna madidihang sebelum kebijakan transshipment diberlakukan pada bulan November 2013-Oktober 2014 mencapai 306.735 ton dan nilai produksinya Rp 6.768,89 Miliar. Setelah kebijakan transshipment diberlakukan pada bulan November 2014-Oktober 2015 produksi ikan tuna madidihang mencapai 187.408 ton dan nilai produksinya Rp 4.246,70 Miliar. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan keputusan Kementerian Kelautan Perikanan mengenai transshipment tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap produksi tuna yang didaratkan di PPN Ternate. Diduga ada faktor yang lain yang memberikan pengaruh lebih terhadap penurunan produksi dan nilai ikan tuna yang didaratkan di PPN Ternate seperti pengalih bongkar muatan ke PPS Bitung dan musim penangkapan.

Keyword: Transshipment, PPN Ternate, Kepmen No. 57.

I. PENDAHULUAN

Transshipment atau pindah kapal secara teknis adalah salah satu obyek pengawasan Otoritas Pabean. Kegiatan transshipment terjadi di tengah laut yang diduga dapat merugikan negara dan

menjadi modus terjadinya ekspor ilegal dan ekspor fiktif yang pada kegiatan perikanan mengarah pada illegal fishing dan unreported fishing.

Transshipment di bidang perikanan adalah kegiatan pindah muatan hasil tangkapan di tengah laut dan sekarang dilarang bagi kapal penangkap ikan yang ada di Indonesia. Aktivitas bongkar muat dan pemindahan hasil tangkapan dari satu kapal ke kapal lainnya di tengah laut, tidak lagi diperbolehkan dan diberikan sanksi tegas bagi yang melanggarnya, sanksi berupa pencabutan izin operasional kapal bagi kapal penangkap ikan yang memindahkan hasil tangkapannya dan bagi nelayan yang membeli atau memindahkan ikan dari kapal penangkap ikan. Mereka dapat dipidana karena dianggap sebagai penadah. Beratnya sanksi bagi yang melanggar diharapkan dapat membuat para pemilik kapal, nakhoda, ABK kapal penangkap ikan dan para nelayan tidak mencoba untuk melakukannya.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57/2014 tentang larangan transshipment tujuannya untuk mencegah kapal bisa mengirim langsung ikan keluar negeri. Larangan ini mendorong agar kapal-kapal harus berlabuh dahulu di pelabuhan Indonesia sebelum melakukan ekspor. Di pelabuhan semua kapal harus membayar berbagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga retribusi dan lainnya. Keputusan ini telah mendapat respons dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) karena mengganggu pola kemitraan lokal yang selama ini dilakukan oleh kapal-kapal nelayan lokal. (Anonimous, 2015). Terdapat dua modus transshipment kapal ikan yang sangat merugikan negara. Pertama, transshipment untuk membawa ikannya langsung ke luar negeri. Kedua, transshipment di dalam negeri, namun dimaksudkan untuk mengacaukan data pelaporan tangkapan yang menyebabkan terjadinya un-reporting (tidak dilaporkan) atau pelaporan yang dimanipulasi.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Propinsi Maluku Utara memegang peranan penting sebagai basis perikanan dalam menunjang perkembangan usaha perikanan terutama penangkapan ikan yang semakin berkembang. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate adalah sebagai home base yang mampu menjamin kelangsungan usaha perikanan. Dibidang produksi, PPN Ternate harus mampu memberikan kemudahan dan pelayanan kapal ikan, membongkar ikan hasil tangkapan, menjamin keamanan lambat labuh dan perbaikan kapal, penyedia dan suplai logistik seperti air tawar bersih, bahan bakar minyak solar dan es untuk mengawetkan ikan diatas kapal, sedangkan untuk Industri pengolahan menyediakan kawasan industri suplai air bersih, listrik, jaminan keamanan investasi, disediakan fasilitas cold storage untuk menyimpan ikan, jaringan transportasi dan pusat pemasaran ikan yang mampu mendistribusikan ikan baik lokal maupun regional serta ekspor.

Pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Ternate sebagai lokasi penelitian karena PPN Ternate merupakan salah satu pelabuhan perikanan tipe B yang mempunyai potensi produksi dan pemasaran hasil tangkapan yang cukup besar dan strategis di Ternate Selatan. PPN Ternate juga merupakan basis armada penangkapan ikan karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Ternate (Malik; 2006). Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate memiliki keunggulan dibandingkan dengan pelabuhan - pelabuhan lain yang berada di sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Ternate pada tahun 2012 yaitu 6,738 ton lebih besar dibandingkan dengan jumlah hasil tangkapan yang didaratkan di PPI dufa - dufa, yaitu 876 ton (Direktorat Perikanan Tangkap, 2012).

Pada tahun 2013 produksi ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yaitu 7.854 ton, sedangkan pada tahun 2014 produksi ikan mencapai 7.168 ton dan pada tahun 2015 produksi ikan menurun yaitu mencapai 4.373 ton. Dari hasil latar belakang di atas digambarkan ada kemungkinan pengaruh kebijakan transshipment terhadap hasil produksi disamping faktor-faktor lain seperti BBM, Musim Penangkapan, Faktor Oseanografi dan lain-lain. Untuk mengetahui Pengaruh Implementasi Peraturan KepMen No 57 Tahun 2014 terhadap aktivitas bongkar muat ikan Tuna di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate sebelum dan setelah dijalankan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak penerapan Implementasi Peraturan KepMen No 57 Tahun 2014 bagi kegiatan bongkar muat Ikan tuna di PPN Ternate sekaligus bahan evaluasi ilmiah sebuah kebijakan pemerintah yang berimbas pada aktivitas perikanan di daerah.

II. METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Penelitian berlangsung pada bulan Oktober 2015 – Januari 2016 dengan lokasi Penelitian pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Alat

Alat yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu: alat tulis menulis yang digunakan untuk pengambilan data wawancara

Pengambilan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data log book aktivitas bongkar muat Ikan Tuna di PPN Ternate selama setahun sebelum dan setelah Implementasi Peraturan KepMen No 57 Tahun 2014 diterapkan untuk melihat dampak dari Peraturan ini bagi kinerja PPN Ternate. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menghubungi kantor PPN Ternate sebagai penyedia data. Untuk mendapatkan gambaran pengambilan data dilakukan juga wawancara langsung dengan staf pendataan pada PPN

Analisis data

Analisis data dilakukan secara deskriptif maupun statistik terhadap data 1 tahun sebelum dan setelah implementasi Peraturan KepMen No 57 Tahun 2014 diterapkan. Analisis deskriptif meliputi jenis jumlah kapal yang melakukan bongkar muat, jenis dan jumlah tangkapan yang didapat, jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan, dan aktivitas kegiatan lain di PPN Ternate misalnya ketersediaan es, sanitasi dll. Analisis statistik dilakukan untuk mengetahui perbedaan yang timbul karena penerapan Peraturan ini terhadap aktivitas bongkar muat di PPN Ternate.

Analisis Deskriptif

Data rekapan pelayanan PPN Ternate selama 1 tahun sebelum dan setelah Implementasi Peraturan KepMen No 57 Tahun 2014 berupa jenis, ukuran dan jumlah kapal; jenis dan jumlah hasil tangkapan; jenis dan jumlah izin; ketersediaan pendukung aktivitas bongkar muat dipaparkan, secara deskriptif dalam bentuk histogram frekuensi. Gaspersz, 1991 menyatakan bahwa data tersebut dapat dikelompokkan ke dalam bentuk sebaran frekuensi melalui penentuan selang dan lebar kelas dengan menggunakan formula:

$$K = 1 + 3,32 \cdot \log(n)$$

$$Range = \text{nilai max} - \text{nilai minimum}$$

$$I = Range/K$$

dimana : K = jumlah kelas, n = jumlah data, I = lebar kelas

Analisis Statistik

Untuk menguji perbedaan dampak yang muncul karena penerapan Peraturan KepMen No 57 Tahun 2014 ini dilakukan analisis statistik terhadap rekapan data 12 bulanan pendaratan ikan tuna pada PPN Ternate sebelum dan setelah kebijakan *transshipment* diberlakukan menggunakan uji hipotesis komparatif dua sampel berkorelasi untuk data Interval/rasio menurut Misbahudin dan Hasan 2014.

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sum D^2 - \frac{(\sum D)^2}{n}}{n - (n - 1)}}$$

dimana : \bar{X} = rata-rata data pendaratan tuna di PPN Ternate setahun sebelum Kepmen KKP no 57 diterapkan, \bar{Y} = rata-rata data pendaratan tuna di PPN Ternate setahun setelah Kepmen KKP no 57 diterapkan, D = Jumlah data pendaratan tuna di PPN Ternate sebelum dan sesudah setahun penerapan Kepmen KKP No. 57 diterapkan dan n = Jumlah pasangan data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN**Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate**

Pelabuhan Perikanan Ternate dibangun pada tahun 1978 dengan berbagai sarana dasar, sarana fungsional, dan sarana penunjang. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate pada awal berdirinya adalah Pelabuhan Perikanan Pantai (type C). Pada pertengahan tahun 2001 dinaikkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (type B). Hal tersebut didasarkan pada perkembangan operasional PPN Ternate yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik

dari sarana prasarana, pencapaian target operasional, maupun jumlah pegawai. Jumlah pegawai di PPN Ternate hingga tahun 2014 mencapai 78 orang yang terdiri dari 34 orang PNS dan 44 tenaga harian lepas (PPN Ternate, 2015). PPN Ternate adalah salah satu Pelabuhan Perikanan yang lokasinya cukup strategis berada dalam kota tepatnya berada di Jalan. Pasar Inpres, Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Akses sarana penunjang seperti Bandara dan Pelabuhan umum dapat dijangkau dengan mudah. Secara geografis PPN Ternate terletak pada posisi 00-46'-0,36 LU dan 127-22'41,10 BT. Seiring dengan perkembangan kegiatan di bidang perikanan, maka ketersediaan lahan industri juga semakin berkurang. Sehubungan dengan hal tersebut PPN Ternate telah melakukan pembebasan lahan seluas 6 Ha pada tahun anggaran 2008 sebelumnya PPN Ternate memiliki lahan seluas 4 ha. Hingga saat ini total luas lahan yang dimiliki oleh PPN Ternate menjadi 10 Ha.

Kondisi Fasilitas mampu menampung kapal s/d 2000 GT, memiliki dukungan logistik berupa es, solar, dan air tawar yang memadai, lahan pelabuhan: \pm 10 Ha yang terdiri dari lahan yang memiliki bangunan seluas \pm 4 Ha yang secara keseluruhan telah dimanfaatkan dan lahan pengembangan seluas \pm 6 Ha yang belum dimanfaatkan. Fungsi pelabuhan perikanan berdasarkan undang-undang nomor 45 tahun 2009 penjelasan 41 A ayat 2 fungsi pelabuhan perikanan yaitu sebagai pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan, pelayanan bongkar muat, pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan, pemasaran dan distribusi ikan, pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan, tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan, pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, pelaksanaan kesyahbandaraan, tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan, publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawasan kapal perikanan, tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari atau pengendalian lingkungan.

Fungsi-fungsi tersebut diatas sebagian besar telah dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara di Ternate bagi pengguna pelabuhan ini yang datang dari masyarakat nelayan, pengusaha maupun pedagang yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Fasilitas-fasilitas yang tersedia antara lain fasilitas utama, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

Fasilitas Utama atau Pokok di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.08/MEN/2012 menjelaskan tentang fasilitas pokok yaitu fasilitas yang diperuntukkan untuk semua pengguna pelabuhan perikanan. Fasilitas Pokok di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dapat digambarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Fasilitas Pokok yang ada di PPN Ternate

No	Jenis Fasilitas	Luas
1	Lahan Eksisting	4 Ha
2	Lahan Pengembangan	6 Ha
3	Lahan Sumur Bor	1.027 m ²
4	Dermaga I	154 m ²
5	Dermaga II	133 m ²
6	Talud 1 Selatan	197 m ²
7	Talud 2 Utara	300 m ²
8	Jalan Pelabuhan	5.140 m
9	Pagar Keliling Sumur Resapan	153.57 m ²
10	Jalan Masuk Cold Storage	460.89 m ²

Sumber : Data PPN Ternate, 2015

Pengamatan selama penelitian dapat diketahui bahwa fasilitas-fasilitas pokok ini dalam kondisi baik dan terpelihara. Fasilitas-fasilitas ini telah dimanfaatkan secara optimal oleh semua pengguna pelabuhan perikanan. Lebih lanjut juga diketahui bahwa dalam perencanaan pelabuhan ini seiring perkembangan aktivitas akan diperluas dan ditambahkan fasilitas pelabuhan ke sisi utara pelabuhan. Hal ini ditandai dengan adanya aktivitas pembangunan pada sisi ini.

Fasilitas Fungsional di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate

Fasilitas Fungsional adalah fasilitas yang diperuntukkan bagi kegiatan para pegawai PPN Ternate oleh semua pengguna pelabuhan perikanan. Kondisi fasilitas fungsional pada PPN Ternate dapat digambarkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Fasilitas Fungsional yang dimiliki PPN Ternate

No	Jenis fasilitas	Luas
1	Kantor	416 m ²
2	Pos Keamanan	45 m ²
3	TPI I	416 m ²
4	TPI II	288 m ²
5	Bangsai Pembongkaran Ikan	340 m ²
6	Pelayanan Satu Atap	282 m ²
7	Balai Pertemuam Nelayan	100 m ²
8	Bengkel	200 m ²
9	Pabrik Es Balok (kap. 10 ton)	1 Unit
10	Cold Storage 100 ton	1 Unit
11	Cold Storage 60 ton	1 Unit
12	Cold Storage 20 ton	1 Unit
13	MCK Umum	54 m ²
14	Gardu Listrik	25 m ²
15	Tangki Air dan Instalasinya	50 m ²
16	Tangki Solar/SPDN	50 m ²
17	Area Parkir	544 m ²
18	Pagar keliling I	500 m
19	Pagar keliling II	450 m
20	Air Blast Frezeer kap. 4 ton	2 Unit
21	Air Blast Frezeer kap. 3 ton	2 Unit
22	Mini Plant	378 m ²
23	Kantor Pelayanan	175 m ²
24	Rumah Genset	32.75 m ²
25	Tempat Penumpukan Cool Box	48 m ²
26	Depot Es	22.5 m ²
27	Bangunan Tempat Sampah Sementara	12.5 m ²

Sumber : Data PPN Ternate, 2015

Kondisi fasilitas fungsional di pelabuhan ini dalam keadaan terawat dan telah difungsikan dengan baik. Fasilitas ini telah dimanfaatkan oleh staf pegawai di PPN Ternate, pemilik armada, pengusaha, pedagang dalam menukung aktivitas mereka. Tempat bekerja, berjualan, mengisi BBM, mengisi air minum pada saat persiapan melakukan penangkapan, tempat pengawetan ikan dan tempat perbaikan alat alat.

Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate

Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang diperuntukkan untuk kegiatan para pegawai PPN Ternate. Ketersediaan fasilitas penunjang di PPN Ternate dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Fasilitas penunjang yang dimiliki PPN Ternate

No	Jenis Fasilitas	volume
1	Rumah Dinas Kepala (120 m ²)	1 Unit
2	Rumah Dinas Jabatan (70 m ²)	3 Unit
3	Rumah Dinas Staf (36 m ²)	10 Unit
4	Gues house (120 m ²)	1 Unit
5	Gudang LPMMHP (300 m ²)	1 Unit
6	Kendaraan Dinas Roda 4	4 Unit
7	Kendaraan Dinas Roda 3	1 Unit
8	Kendaraan Dinas Roda 2	12 Unit
9	Truk Berinsuasi (Roda 6)	1 Unit
10	Kendaraan Pickup(Roda 4)	1 Unit
11	Musollah (100 m ²)	1 Unit
12	Kantor Pegadaian (42 m ²)	1 Unit
13	Garasi	1 Unit
14	Gudang K5	1 Unit

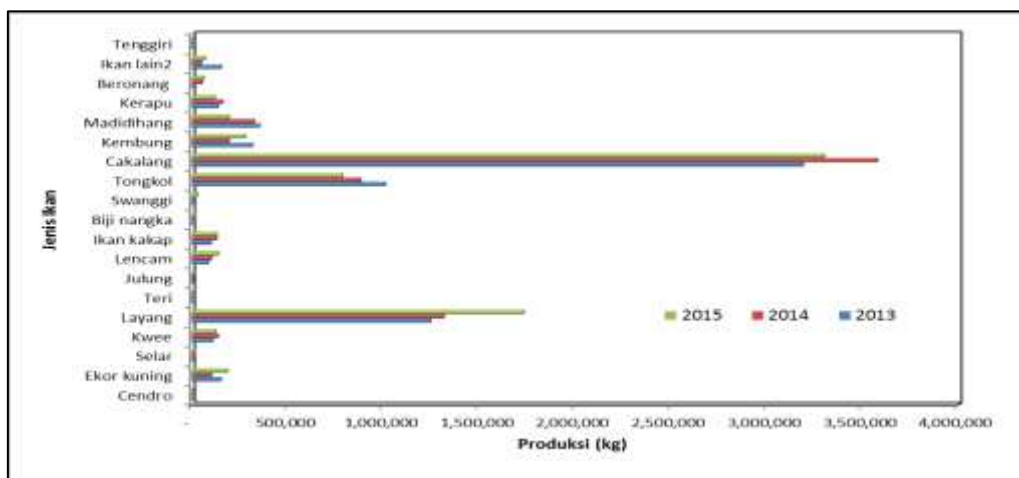
Sumber : Data PPN Ternate, 2015

Fasilitas fungsional di pelabuhan ini dalam keadaan terjaga dan telah difungsikan dengan baik. Fasilitas ini telah dimanfaatkan oleh staf pegawai di PPN Ternate, pedagang, pengumpul ikan maupun untuk tempat tinggal, tempat beribadah, meminjam uang, tempat parkir, menguji mutu ikan, dan lain-lain

Produksi dan Nilai Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun 2013-2015

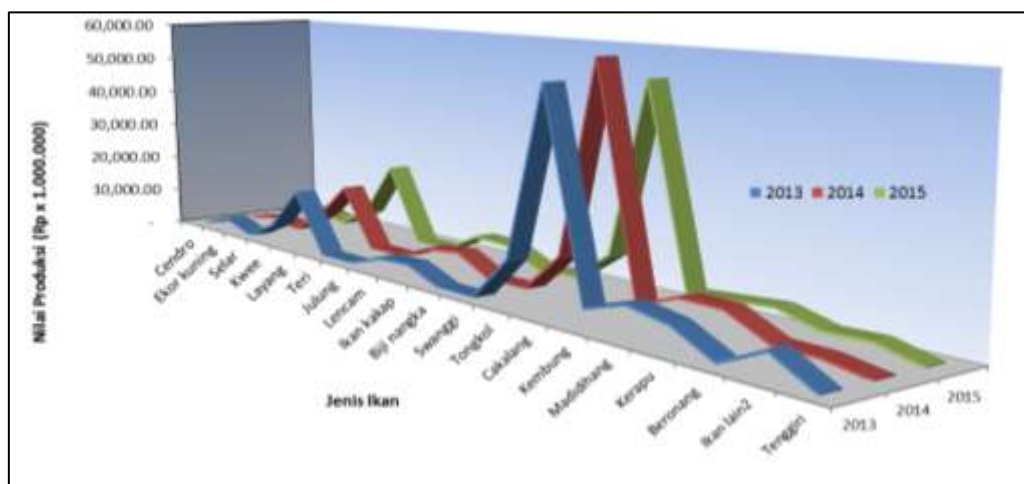
Ada 19 komoditas perikanan yang dibongkar di Pelabuhan Perikanan Ternate. Komoditas-komoditas itu antara lain : Cendro (*Tylosorus sp*), ekor kuning (*Caesio sp*), Kuwe (*Caranx spp*), selar (*Selaroides sp*), layang (*Decapterus spp*), teri (*Stolephorus spp*), julung (*Hemirhamphus spp*), lencam (*Lethrinusspp*), Kakap (*Latescalcalifer*), biji nangka (*Upeneus spp*), swanggi (*Priacanthus spp*), tongkol (*Euthynnus affinis*), cakalang (*Katsuwonus pelamis*), kembung (*Rastrelliger kanagurta L*), Madidihang (*Thunnus albacares*), kerapu (*Epinephelus tauvina Forsskal, 1775*), beronang (*Siganus canaliculatus Park, 1797*), Tenggiri (*Scomberomorus guttatus*) dan ikan lain-lain.

Produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPN ternate selama tahun 2013-2015 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Produksi Ikan yang didaratkan di PPN Ternate Selama Tahun 2013-2015

Hasil penelitian produksi ikan yang didaratkan di PPN Ternate yang paling banyak ikan cakalang yaitu mencapai 3.186.358 ton dan produksi ikan yang paling sedikit ikan julung 2.280 ton pada tahun 2013. Dan pada tahun 2014 ikan yang di daratkan di PPN Ternate paling banyak ikan cakalang yaitu mencapai 3.573.748 ton dan produksi ikan yang pailng sedikit ikan julung 5.520 ton dan pada tahun 2015 ikan yang di daratkan di PPN Ternate paling banyak ikan cakalang yaitu mencapai 3.298.455 ton dan produksi ikan yang paling sedikit ikan teri 240 ton. Selanjutnya nilai produksi ikan yang didaratkan di PPN Ternate selama tahun 2013-2015 dapat dilihat pada Gambar 2.

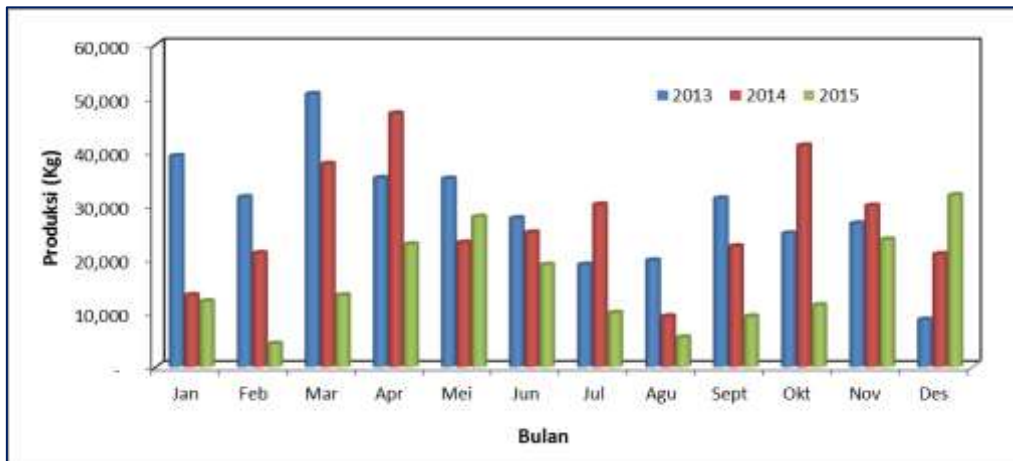


Gambar 2. Nilai Produksi Ikan yang didaratkan di PPN Ternate Selama Tahun 2013-2015

Nilai produksi ikan yang tertinggi yaitu ikan cakalang pada tahun 2013 mencapai Rp 53.462,45 dan yang terendah ikan julung Rp 44,41 juta dan pada tahun 2014 nilai produksi ikan yang paling banyak adalah ikan cakalang Rp 58.450,68 dan paling sedikit ikan julung Rp 27,92 juta dan tahun 2015 nilai produksi ikan yang tertinggi yaitu ikan cakalang dengan nilai Rp 52.551,13 dan nilai produksi yang terendah yaitu ikan teri mencapai Rp 2,40 juta

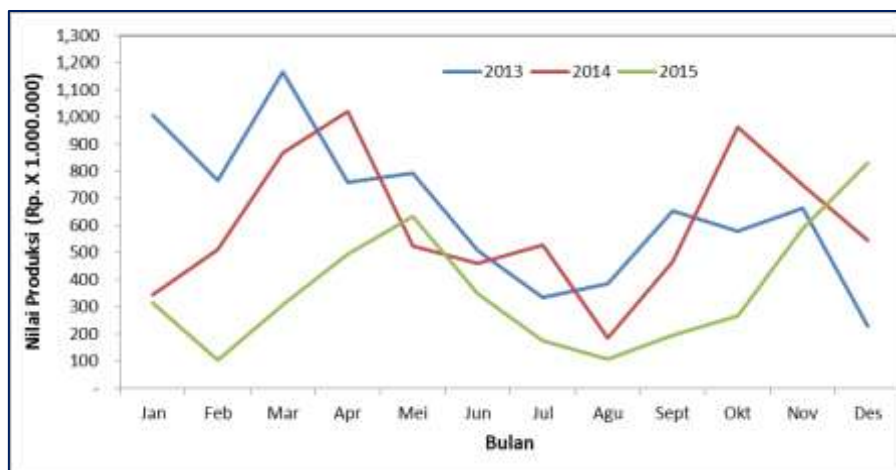
Produksi dan Nilai Produksi Ikan Tuna yang dibongkar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate tahun 2013-2015

Hasil pengumpulan data di PPN Ternate di dapatkan bahwa hanya ikan tuna yang terdata yaitu Tuna sirip kuning atau madidihang (*Thunnus albacares*). Produksi ikan tuna yang didaratkan tahun 2013-2015 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Produksi Ikan Tuna yang didaratkan di PPN Ternate selama tahun 2013-2015

Hasil penelitan di PPN Ternate produksi ikan Tuna pada tahun 2013 paling banyak pada bulan Maret yaitu mencapai 50.820 ton dan yang paling sedikit pada Desember mencapai 8.820 ton, pada tahun 2014 produksi ikan tuna yang paling banyak pada bulan April mencapai 47.199 ton dan yang paling sedikit pada bulan agustus 9.450 ton dan pada tahun 2015 produksi ikan tuna pada bulan Desember mencapai 31.986 ton dan paling sedikit pada bulan Februari 4.337 ton. Selanjutnya nilai Produksi ikan tuna kurun waktu 2013-2015 dapat digambarkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Nilai Produksi ikan tuna yang dibongkar di PPN Ternate Kurun waktu 2013-2015

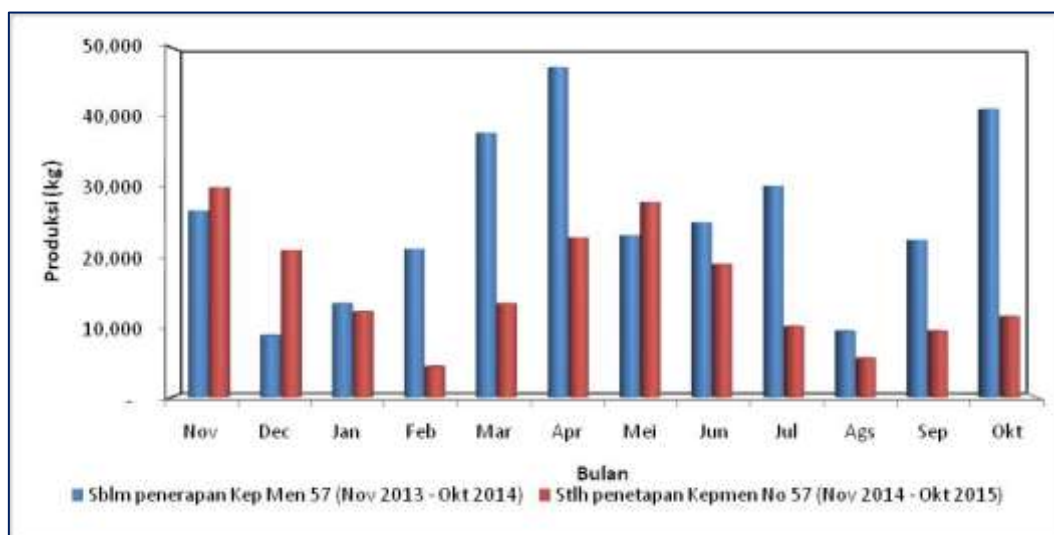
Berdasarkan penelitan nilai produksi ikan tuna pada tahun 2013 paling banyak pada bulan Maret mencapai Rp 1.166,23 dan yang paling sedikit pada bulan Desember mencapai Rp 228 juta. Pada tahun 2014 produksi ikan tuna paling banyak bulan April Rp 1.019,99 dan yang paling sedikit pada bulan Agustus Rp 184 juta dan pada tahun 2015 nilai produksi ikan tuna paling banyak mencapai Rp 829 juta pada bulan Desember dan yang paling sedikit Rp 104 juta pada bulan Februari

Analisis Perbandingan Produksi dan Nilai Ikan Tuna yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan sebelum dan setelah berlakunya KepMen KKP No 57 Tahun 2014

Bulan November 2014, pemerintah lewat Kementerian Kelautan Perikanan telah mengeluarkan surat keputusan No. 57 untuk menata kegiatan bongkar muat hasil penangkapan ikan di Indonesia yang disebut sebagai Kebijakan *transshipment*. Kebijakan diharapkan memberikan sumbangsih bagi nilai produksi perikanan di Indonesia pada tingkat Nasional maupun lokal yang sekian tahun terpuruk karena kegiatan bongkar muat yang berlangsung di tengah laut, mengurangi *illegal fishing*, *unreported* dan *unregulated fishing*. Imbas dari pelaksanaan peraturan ini terlihat pada kegiatan perikanan ekonomis penting, seperti perikanan tuna dan cakalang yang merupakan komoditas ekspor Indonesia.

Gambaran nyata pelaksanaan dari keputusan ini terlihat pada aktivitas bongkar muat hasil perikanan berorientasi ekspor di semua Pelabuhan Perikanan di Indonesia. Di Propinsi Maluku Utara, aktivitas bongkar muat ikan tuna di PPN Ternate menggambarkan bahwa ada perbedaan nyata dalam aktivitas bongkar muat ikan tuna sebelum dan setelah keputusan *transshipment* ini di perlakukan.

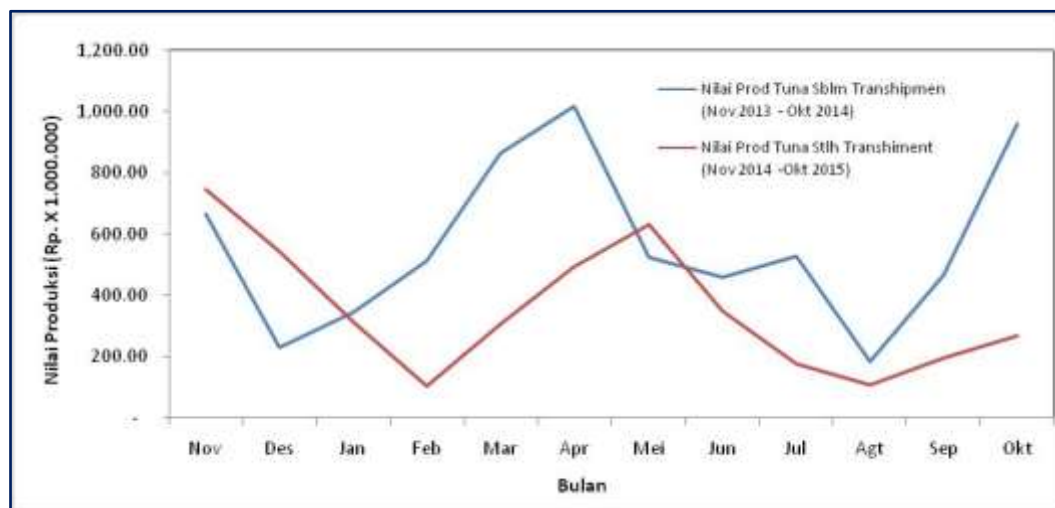
Kondisi bongkar muat ikan tuna sebelum dan setelah keputusan *transshipment* di perlakukan dapat diperlihatkan pada produksi dan nilai produksi ikan tuna dari data Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Gambar 5) yang diambil dari bulan November 2013 – Oktober 2014 sebagai data sebelum dilaksanakan kebijaksanaan *Transshipment* dan data setelah pelaksanaan kebijaksanaan *Transshipment* (November 2014 – Oktober 2015).



Gambar 5. Produksi ikan tuna Madidihang (*Thunnus albacares*) sebelum dan setelah kebijakan *transshipment*

Hasil penelitian produksi ikan tuna madidihang sebelum kebijakan *transshipment* di berlakukan pada bulan November 2013- Oktober 2014 produksi tertinggi pada bulan April 2014 mencapai 47.199 ton dan yang ter rendah pada bulan Desember 2013 mencapai 8.820 ton dan setelah kebijakan *transshipment* di berlakukan November 2014-Oktober 2015, Produksi ikan tuna pada bulan November 2014 mencapai 30.037 ton dan yang paling rendah pada bulan Februari 2015 mencapai 4.337 ton.

Nilai produksi tuna Madidihang yang dibongkar di Pelabuhan Perikanan Ternate dapat digambarkan pada Gambar 6. Hasil penelitan nilai produksi ikan tuna madidihang sebelum kebijakan *transshipment* di berlakukan pada bulan November 2013- Oktober 2014, nilai produksi tertinggi pada bulan April 2014 mencapai Rp 1,02 Miliar dan yang ter rendah pada bulan Agustus 2014 Rp 184 juta dan setelah kebijakan *transshipment* di berlakukan November 2014-Oktober 2015, nilai produksi ikan tuna tertinggi terjadi pada bulan November 2014 mencapai Rp 748,25 juta dan yang paling rendah pada bulan Februari 2015 mencapai Rp 104.98 juta. Analisis lebih lanjut mendapatkan bahwa pada masa 1 setahun sebelum kebijakan *transshipment* dilakukan total nilai produksi ikan tuna madidihang adalah sebesar Rp. 6,768 miliar (Nov 2013 hingga Okt 2014), sedangkan setelah *transshipment* didapati total nilai produksi ikan tuna yang didaratkan di PPN Ternate sebesar Rp. 4,246 Miliar (Nov 2014 hingga Okt 2015).



Gambar 6. Nilai Produksi ikan tuna madidihang yang didaratkan di PPN Ternate pra dan pasca berlakunya kebijakan *transshipment*.

Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa kebijakan *transshipment* juga memberikan andil menurunnya nilai produksi pada PPN Ternate kurun waktu 1 tahun sejak diimplementasikan sebesar 37,26 % (terhitung sejak Nov 2014-Okt 2015) Adanya penurunan nilai produksi hasil perikanan setelah *transshipment* juga terjadi pada Pelabuhan Perikanan Samudra di Bitung yang berskala besar dimana karena adanya jeda operasi penangkapan armada pukat cincin yang dioperasikan di WPP NRI 716 dan 717 yang berbasis di Bitung telah mengurangi pasokan bahan baku ke pabrik pengalengan tuna di Bitung dan sekitarnya sebesar ± 40.968 ton ikan tuna sejak ± 8 bulan terakhir sejak tahun 2014 (Widodo dan Suryanto, 2015).

Hasil analisis menunjukkan analisis perbandingan (komparatif) untuk mengetahui pengaruh kebijakan *transshipment* terhadap produksi ikan tuna yang didaratkan di PPN Ternate mendapatkan nilai t_{hitung} sebesar 0,2233 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,201 pada taraf nyata ($\alpha = 0,05$). Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keputusan Kementerian Kelautan Perikanan mengenai *transshipment* tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap produksi tuna yang didaratkan di PPN Ternate. Diduga ada faktor yang lain yang memberikan pengaruh lebih terhadap penurunan produksi dan nilai ikan tuna yang didaratkan di PPN Ternate seperti pengalih bongkar muatan ke PPS Bitung dan musim penangkapan.

Illegal dan Unreported Fishing di Maluku Utara

Hasil penelusuran Pustaka maupun data mengenai *transshipment* di perairan Provinsi Maluku Utara tidak memberikan informasi yang pasti tentang jumlah maupun aktivitas yang terjadi sebelum atau setelah implementasi aturan ini. Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang berkompeten dengan kebijakan ini seperti Angkatan Laut (Lanal Ternate) maupun pihak Polri (Polairut Ternate) tidak memiliki data. Berbagai pendekatan telah dilakukan namun hingga penelitian ini tidak ada kepastian ketersediaan data.

Data yang tersedia adalah Illegal Fishing, Unregulated Fishing dan Unreported Fishing yang dimiliki oleh KKP propinsi Maluku dan dapat diakses. Penelitian Hikmayani *et al.*, 2015 menghasilkan data *transshipment* yang dikaji pada 2 dari 3 pelabuhan perikanan besar yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Nizam Zachman dan PPS Bitung mendapatkan bahwa kurun waktu 2014 sampai Februari 2015 terjadi kenaikan aktivitas transportasi hasil tangkapan pada awal-awal kebijakan namun cenderung menurun beberapa bulan setelah penerapan peraturan ini. Hal ini pun terjadi di perairan Ternate karena kapal ikan cenderung berpindah ke pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara yang memiliki fasilitas bongkar yang lebih baik

Menurut Arifin Neka (2009), beberapa kasus pelanggaran maupun kejahatan perikanan yang terjadi di laut Halmahera Provinsi Maluku Utara, dapat dilihat pada Tabel 4. berikut:

Tabel 4. Jenis Perkara dan Putusan Pengadilan terhadap Kegiatan Illegal fishing di Perairan Halmahera hasil pengawasan KP HIU 005 Tahun 2009

No	Perkara	Putusan Pengadilan Perikanan
1	Tersangka : LESENIO P.LITERATUS Asal : WNA - Philipina Nama Kapal : KM. PATANI -018 Tonase Kapal : 10 GT Jenis Kapal : Pumpboat Bendera : Indonesia Penangkap : KP. Hiu Macan 003 Tanggal : 13 Januari 2009 Lokasi : Per.Laut Halmahera Pelanggaran : pasal 7 ayat (2) huruf d UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan	Pidana denda Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) subsider 6 bulan kurungan, barang bukti uang hasil lelang ikan sebesar Rp. 7.353.535,43 dirampas untuk Negara, barang bukti kapal dan dokumen diserahkan kepada pemilik melalui Nakhoda

Menurut Bahar Kaidati (2008), jumlah produksi perikanan yang tidak dilaporkan oleh nelayan lokal di wilayah Kota Ternate setiap bulannya adalah sebesar 25,03% (268,34 ton) dari produksi yang dilaporkan dengan nilai sebesar 46% (Rp 377.284,07 juta) dari total nilai yang dilaporkan. Sedangkan jumlah produksi *unreported fisheries* oleh nelayan asing kemungkinan lebih besar lagi karena mereka menggunakan armada dan teknologi penangkapan yang lebih modern dibandingkan dengan nelayan lokal yang sebagian besar beroperasi secara tradisional.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di Pelabuhan perikanan Nusantara Ternate, maka di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Produksi ikan tuna madidihang (*Thunus albacares*) sebelum kebijakan *transshipment* diberlakukan pada bulan November 2013-Oktober 2014 mencapai 306.735 ton dan nilai produksinya 6.768,89 Miliar. Setelah kebijakan *transshipment* diberlakukan pada bulan November 2014-Oktober 2015 produksi ikan tuna madidihang mencapai 187.408 ton dan nilai produksinya Rp 4.246,70 Miliar
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan keputusan Kementerian Kelautan Perikanan mengenai *transshipment* tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap produksi tuna yang didaratkan di PPN Ternate. Diduga ada faktor yang lain yang memberikan pengaruh lebih terhadap penurunan produksi dan nilai ikan tuna yang didaratkan di PPN Ternate seperti pengalih bongkar muatan ke PPS Bitung dan musim penangkapan.
3. Hasil pengambilan data mengenai *transshipment* di perairan Provinsi Maluku Utara tidak memberikan informasi yang pasti tentang jumlah maupun aktivitas yang terjadi sebelum atau setelah implementasi aturan ini. Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang berkompeten dengan kebijakan ini seperti Angkatan Laut (Lanal Ternate) maupun pihak Polri (Polairut Ternate) tidak memiliki data. Data yang tersedia adalah Illegal Fishing, Unregulated Fishing dan Unreported Fishing yang dimiliki oleh KKP provinsi Maluku Utara,

Perlu dilakukan kajian lanjut yang menitikberatkan pada aspek diluar *transshipment* yang mempengaruhi aktivitas bongkar muat kapal ikan tuna di PPN Ternate yang cenderung menurun..

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, A. 1998. Study Pengembangan PPI 10 Uli Palembang. Skripsi. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian.
- Arifin, et al. 2009. Analisis Kebijakan Penanggulangan Ilegal fishing di Kabupaten Halmahera Utara. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.
- Anonimous. 2015. Keluarkan Aturan Baru Transshipment. Media Bisnis <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/01/23/142649/susi-keluarkan-aturan-baru-transshipment/#.Vgd1nKNM3xU>. Di akses pada tanggal 27 september 2015

- Bahar K. 2008. Analisis Ekonomi Perikanan yang tidak di Laporkan (Unreported Fisheries) di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Desiwardani, S. 2007. Pengaruh Hasil Tangkapan dan Kondisi Kesejahteraan Nelayan di Desa Sungaibuntu Karawang Jawa Barat [Skripsi]. Bogor: Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Lubis E, 2012. Pelabuhan Perikanan. Kampus IPB Kencana Bogor.
- Febrisma, T. 1997. Proses Pendaratan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- Hendry.M.2015. Transhipmen Di larang Bagi Kapal Penangkapan Ikan. Medan Bisnis. <http://www.medanbisnisdaliy.com/news/read/2015/01/24/142952/> Transshipment. Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2015.
- Hikmayani, et al. 2015. evektivitas Pemberlakuan Kebijakan Monotorium Kapal Eks Asing dan Transshipment Terhadap Kinerja Usaha Penagkapan Ikan. Badai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- Gaspersz, V. 1991. Metode Perancangan Percobaan untuk ilmu-ilmu Pertanian, Ilmu-Ilmu Biologi. Bandung: Armico. 271 hal.
- Gustina A.2014. Analisis Transshipment Pasal 69 Ayat 3 Pelatruan Menteri Kelautan Perikanan No. 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No. 2 Mei 2014
- Lubis. E. 2000. Buku I: Pengantar Pelabuhan Perikanan. Bahan Kuliah Pelabuhan Perikanan. Bogor: Laboratorium Pelabuhan Perikanan, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Lubis, E. 2006. Buku I: Pengantar Pelabuhan Perikanan. Bogor: Laboratorium Pelabuhan Perikanan, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Mahendra, R. 2001. Studi Persaingan Hasil Tangkapan dan Aktivitas Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dan Pangkalan Pendaratan Ikan Bajomulyo [Skripsi]. Bogor: Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Malik, JS. 2006. Kajian Distribusi Hasil Tangkapan Ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bastiong, Ternate Utara [Skripsi]. Bogor: Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Misbahuddin dan I. Hasan. 2014. Analisis Data Penelitian Statistik dengan Statistik. Penerbit Bumi Aksara. Edisi ke-2. Jakarta
- Mulyadi, MD. 2007. Analisis Pendaratan dan Penanganan Hasil Tangkapan serta Fasilitas Terkait di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan. Skripsi.. Bogor: Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Murdiyanto, B. 2004. Pelabuhan Perikanan. InstitutPertanian Bogor.
- Pelabuhan Perikana Nusantara Ternate, 2011. Laporoan Tahunan Pelabuhan Nusantara Ternate. Dirtktorat Jendral Perikana Tangkap. Tahun 2010.
- Saanin H. 1984. Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan I & II. Jakarta : Bina Cipta.
- Syaiful A. 2006. Sistem Kepabeaan Indonesia. BPPK.
- Sukman Y.2015. Transshipment Lazim Di Usaha Perikanan. Kontan Com. <http://indusri.kontan.co.id/news/knti-transshipment-lazim-di-usaha.pe...> Di akses Pada Tanggal 11 Mei 2015
- Wahyuni, S. 2011. Histamin Tuna (Thunnus sp) dan Identifikasi Bakteri Pembentuknya pada
- Widodo A A. dan Suryanto. 2015. Analisis Dampak Pelarangan Alih Muatan (Transhiment) Ikan Hasil Tangkapan Pada Armada Pukat Cincin Pelagis Besar (Studi kasus pada perikanan pukat cincin pelagis besar di WPP NRI 716-717 berbasis di Bitung). Jurnal Kebijak.Perikan.Ind. Vol.7 No.2 November 2015:94.